

ABSTRAK

AKHSRULLAH. *Intervensi Pejabat Politik Dalam Mutasi Pejabat Struktural Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa* (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Burhamuddin).

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk mampu merealisasikan pokok-pokok kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang ada dengan sebaik-baiknya dalam rangka menciptakan birokrasi yang netral dan bebas dari bentuk intervensi dan kepentingan dari pejabat politik dan partai. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan proses mutasi pegawai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP RI No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP RI No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan struktural di lingkup Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Gowa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan pola intervensi pejabat politik terhadap pejabat struktural di Sekretariat Daerah Kota Makassar Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisa data yang digunakan adalah *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen. Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pegawai BKDD Kabupaten Gowa dan Pejabat Struktural yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pola-pola intervensi dari partai politik melalui pejabat politik terhadap mutasi pejabat struktural di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Dengan adanya Intervensi dari pejabat politik terhadap mutasi pejabat struktural membawa pengaruh negatif terhadap tatanan birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dalam hal ini manajemen kepegawaian.

Keyword: Intervensi Pejabat Politik dan Mutasi